

EDITORIAL

Pengembangan masyarakat multikultural demokratis menjadi kebutuhan bagi bangsa Indonesia yang ditandai oleh kemajemukan (pluralitas) dan keanekaragaman (heterogenitas), sebab multikultural pada dasarnya menekankan pada kesederajatan kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat, dan mengusung semangat untuk hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) dalam perbedaan kultur yang ada baik secara individual maupun secara kelompok dan masyarakat. Masyarakat multikultural demokratis Indonesia yang sehat tidak bisa dibangun secara *taken for granted* atau *trial and error*. Sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, integrated dan berkesinambungan. Salah satu strategi itu adalah melalui pendidikan kewarganegaraan.

Dalam edisi kedua ini, Acta Civicus hadir dengan tema “Inovasi PKn untuk membangun masyarakat multikultural yang demokratis”. Pada bagian awal, Freddy K. Kalidjernih menyoroti beberapa aspek historis dan politik formulasi cita sipil (*civic ideal*) Indonesia, khususnya dikaitkan dengan pendidikan kewarganegaraan dengan mengambil perspektif pasca-kolonial. Baginya, terdapat tiga faktor yang menjadi tantangan dalam merevitalisasi cita sipil melalui formulasi pendidikan kewarganegaraan, kini dan masa depan. Ketiga faktor itu adalah otoritas negara, struktur pasca-kolonial, dan kultur pasca-kolonial. Pembahasannya dirangkum dalam tajuk *Cita Sipil Indonesia Pasca-kolonial: Masalah Lama, Tantangan Baru*.

Dari perspetif sosial politik, Karim Suryadi menyajikan tajuk *Partai Politik, Civic Literacy dan Mimpi Kemakmuran Rakyat*. Dalam bagian ini, *civic literacy* sebagai derajat kompetensi dan kemauan untuk terlibat dalam merumuskan kebaikan bersama yang terbangun melalui usaha sadar yang dilakukan individu, lembaga politik, maupun pilihan kebijakan yang diambil bukan hanya menjadi dependen melainkan juga independen variabel bagi pilihan kebijakan pemerintahan untuk peningkatan kemakmuran masyarakat demokratis.

Sutrisna Widjaja, memandang perlunya kembali mengarahkan perjalanan bangsa dan negara dalam rangka pencapaian cita-cita bangsa dan negara sesuai amanat UUD 1945. Ia menyajikan alternatif model pendidikan kewarganegaraan untuk tujuan tersebut yang ia kemas dalam tajuk *Mengarahkan Kembali Perjalanan Bangsa dan Negara*. Sementara itu, Hartono memandang perlunya dikembangkan karakter diri yang kuat sebagai sistem nilai diri budaya bangsa menuju bangsa Indonesia yang maju. Pembahasannya dikemas dalam tajuk *Mengembangkan Karakter Diri Adab Karsa Tinggi*.

Dari perspektif pendidikan kewarganegaraan persekolahan, *Dasim Budimansyah* memandang perlunya inovasi dan pemberdayaan pembelajaran PKn sebagai subjek pembelajaran yang kuat yang pada gilirannya dapat mendukung ketercapaian misi PKn dalam rangka mencerdaskan bangsa melalui koridor *value based education*. Ia menawarkan Praktik Belajar Kewarganegaraan (*project citizen*) sebagai model adaptif untuk pembelajaran PKn yang dikemas dalam tajuk *Revitalisasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (Project Citizen)*.

Edisi kedua ini, juga menyajikan satu ringkasan Disertasi dan dua ringkasan Tesis. Ringkasan pertama adalah Disertasi yang ditulis *Sapriya* yang bertajuk *Perspektif Pemikiran Pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa (Sebuah Kajian Konseptual-Filosofis Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan IPS)*. Ringkasan tesis masing-masing adalah tesis yang ditulis *Tri Wantoro* bertajuk *Profil Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Demokrasi (Studi Analisis Kualitatif Pembelajaran Demokrasi di SMA Negeri Kabupaten Subang)*, dan tesis yang ditulis *Fajar Ismadi* bertajuk *Model Pembelajaran Pendidikan Berbasis Pendekatan Multikultural dalam Pembentukan Karakter Bangsa (Penelitian Tindakan Kelas di SMP Negeri 2 Lelea Indramayu)*.

Akhirnya selamat berselancar mengarungi samudera baru ilmu pengetahuan, terutama pengembangan masyarakat multikultural demokratis melalui pendidikan kewarganegaraan.